

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember Tahun 2019 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember ini merupakan wujud pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2019. Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggung jawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Jember Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indicator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember Tahun 2019.

Akhir kata, kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember Tahun 2020.

Pebruari 2021

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN JEMBER**



DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
A. RENCANA STRATEGIS	6
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	8
C. PERJANJIAN KINERJA	12
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	12
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	14
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2018	14
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	15
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	29
BAB IV. PENUTUP.	34
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2016-2021	
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	
Lampiran 4. Lampiran SK IKU OPD	
Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2020 (jika ada)	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2020 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2021 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020.

Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis berikut Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran. Perubahan tersebut tercantum dalam (Tabel 4.1) Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2021, yaitu “Mengelola situasi kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman “.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2020 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2016-2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya penegakan peraturan daerah mendapat predikat nilai Baik Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 2 (dua) indikator sasaran, dengan capaian 2 (dua) indikator dengan capaian tergolong **Kurang**.

Sasaran 2 : Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat mendapat predikat nilai Kurang. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 2 (dua) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong Kurang, 1 (satu) indikator tergolong **Kurang**.

Sasaran 3 : Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran mendapat predikat nilai Cukup. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian tergolong **Baik**.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 68,75% indikator capaian hampir memenuhi target yaitu dalam kategori **Cukup**, 16 % indikator capaiannya **Kurang**, **80,95** % capaian dalam kategori **Baik**. Pencapaian indikator yang bernilai kurang merupakan permasalahan yang perlu dirumuskan upaya dan solusi alternatif dalam rangka pengukuran kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang, hal ini terjadi dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang membatasi untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2020 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar 53,72 % merupakan Belanja Langsung atau sebesar Rp.10.490.416.200 dan Belanja Tidak Langsung sebesar 46,28 % atau sebesar Rp.9.037.354.942,28.

Sedangkan realisasi belanja langsung sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp 4.114.910.818,- dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 yang disampaikan dibawah ini merupakan data riil dan sudah diaudit oleh BPK.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2020 antara lain:

1. Rendahnya pengetahuan, pemahaman dan penguasaan terhadap peraturan daerah yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja maupun pelaksanaan tugas-tugas dilapangan dari beberapa personil Satpol PP.
2. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Menganggap bahwa Peraturan Daerah hanya akan berlaku saat petugas ada,

menjadikan seakan-akan persoalan yang telah diatur didalam Perda hanya dapat dioptimalkan apabila langsung dilakukan pengawalan dan pengawasan secara kontinu oleh personil Satpol PP.

3. Kurangnya tingkat kesejahteraan anggota Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan masih kurang maksimal.
4. Belum adanya regulasi yang benar-benar sangat memihak kepada aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas-tugas dilapangan, hal ini berdampak terhadap sanksi para pelaku pelanggaran Perda dan peraturan Perundang-undangan yang tidak/kurang memberikan efek jera terhadap pelakunya.
5. Sarana dan Prasarana pos kamling yang kurang mendukung dan kurang memadai
6. Sumber Daya masyarakat (khususnya anggota Linmas) yang kurang memadai dilihat dari tolok ukur tingkat pendidikan, begitu juga seragam dan atribut Linmas yang kurang memadai dan masih banyak anggota yang belum mempunyai seragam dan atribut
7. Pos Damkar dan Sarana Prasarana dari Damkar masih kurang memadai dibandingkan dengan luasnya wilayah Kabupaten Jember, selain itu keterbatasan jumlah personil Damkar dan kondisi jalan raya yang kepadatannya semakin meningkat, sangat mempengaruhi terhadap rendahnya waktu respon penanganan kebakaran dan lain sebagainya,

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Meningkatkan kualitas aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja dengan berbagai kegiatan pelatihan dan pemantapan anggota.
2. Mengadakan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah (PERDA) kepada anggota masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
3. Meningkatkan tingkat kesejahteraan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dimulai dari peningkatan honor/gaji anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang masih belum berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

4. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi menyeluruh dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam penerbitan dan pembuatan regulasi/peraturan dalam rangka memperkuat peran dan fungsi serta memberikan sanksi yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran Perda.
5. Salah satunya langkah yang diambil dengan mengadakan Lomba poskamling dengan hadiah berupa uang pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Jember yang bertujuan untuk membangkitkan kembali Pos Kamling yang kurang aktif dan lama tidak beraktivitas.
6. Meningkatkan kemampuan serta keterampilan anggota Satlinmas agar memadai dengan jalan mengadakan pembinaan rutin, pelatihan terhadap anggota LINMAS di masing-masing kecamatan dan memberikan Seragam.
7. Menambah Pos Pemadam Kebakaran yang lebih merata yang mampu menjangkau luas wilayah kabupaten Jember disertai dengan penambahan sarana dan prasarana di masing-masing pos, khususnya juga perlu ada armada pemadam kebakaran yang lebih kecil dan mampu menjangkau gang-gang sempit, serta jumlah sumber daya manusia/ personil yang mampu mengoperasikan segala bentuk sarana dan prasarana yang ada tersebut dengan waktu respon yang lebih cepat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan

dalam perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember dalam rangka meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JEMBER

Pada tahun 2020 ini Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam 2 (dua) Peraturan Bupati, yaitu periode bulan Januari sd. Oktober 2020 menggunakan Peraturan Bupati Jember Nomor 116 tahun 2019 sedangkan periode bulan Nopember sd Desember 2020 menggunakan Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2016.

Perubahan kedua Peraturan Bupati tersebut tidak terlalu signifikan pada Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember, hanya terjadi sedikit penggantian nomenklatur Seksi Bina Potensi Masyarakat dan **Poskamling** menjadi Seksi Bina Potensi Masyarakat, selebihnya tetap sama.

Sehingga berdasarkan kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Peraturan Bupati

Jember Nomor 49 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember sebagai berikut :

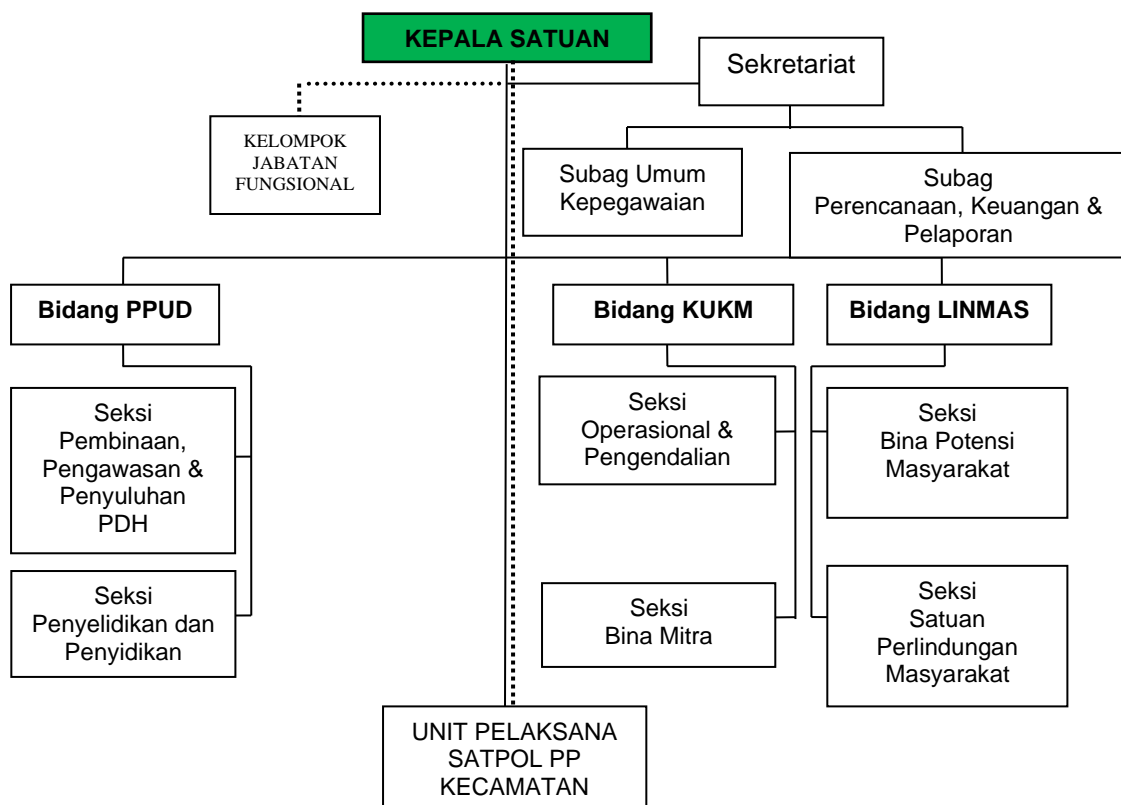
- (1) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi
 - a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran;
 - b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - c. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, terdiri dari:

1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Produk Hukum Daerah; dan
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat , terdiri dari:
1. Seksi Operasional dan Pengendalian;
 2. Seksi Bina Mitra.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
- a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

(6). Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

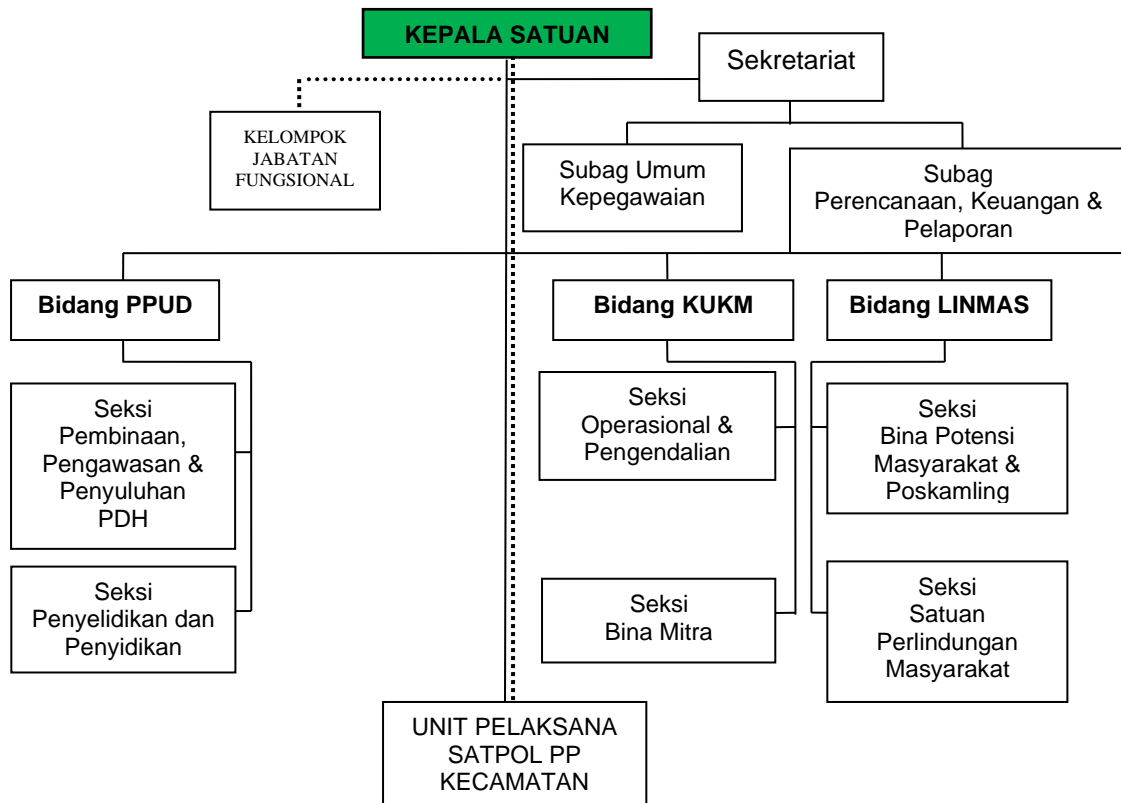
Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember berdasarkan Perbup No. 46 tahun 2016.

Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember berdasarkan Perbup No. 116 tahun 2019 sebagai berikut:



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember berdasarkan Perbup No 116 tahun 2019

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember telah dituangkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis OPD Kabupaten Jember sesuai Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2017, tentang Perubahan Rencana Strategis OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi Kabupaten Jember

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember merupakan salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jember 2016-2021 yaitu:

“Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan Dan Mandiri “

Yang diwujudkan melalui 3 (tiga) Misi, yaitu :

- 1) Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
- 2) Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Yang Berkeadilan
- 3) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri, dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan

2. Tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran Strategis Kabupaten yang ke 1 (satu) Yaitu :

“ Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik “

Tujuan yang dirumuskan sebagai kondisi jangka menengah yang akan dicapai yaitu Tujuan 1

“Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dan Bersih (*Clean Government*), serta Profesionalitas Pelayanan Publik”

Dengan Sasaran: 1

“Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik”

3. Strategi dan Kebijakan Untuk Mencapai Tujuan Dan Sasaran

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember menetapkan strategi, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- **Tujuan** : Mengelola situasi kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman
- **Sasaran** : 1. Meningkatnya penegakan peraturan daerah
2. Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat
3. Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran
- **Strategi** yang diambil adalah Penguatan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dengan melakukan pendekatan humanitas dan represif dalam menjaga ketentraman dan ketertiban yang ada di masyarakat melalui penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Kebijakan Kepala Daerah
- **Kebijakan** yang diambil adalah Peningkatan penyelenggaraan pemerintah melalui penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Kebijakan Kepala Daerah yang konsisten dan konsekuen namun mengedepankan humanitas dalam menjalankan tupoksi.

➤ **Program – program** yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pemahaman Peraturan Perundang-undangan dan Penanganan Pelanggaran Perda
2. Program Peningkatan Disiplin dan Penguatan Wawasan Kebangsaan
3. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan (refocusing)
4. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
5. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
6. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) (refocusing)
7. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam (refocusing)
8. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember melalui berbagai kegiatan di tahun 2020.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Ada 3 (tiga) sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember pada Tahun Anggaran 2020 yaitu :

Sasaran 1 : Meningkatnya penegakan peraturan daerah

Indikator Sasaran : 1. Persentase pelanggaran peraturan daerah
2. Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani

Sasaran 2 : Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat

.Indikator Sasaran : 1. Rasio jumlah Pos kamling per 100 KK
2.Rasio jumlah satlinmas per RT

Sasaran 3 : Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran

Indikator Sasaran: Rata-rata waktu respon (respon time rate) penanganan kebakaran

2. Program dan Indikator Program

Program-program utama yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember Tahun 2020 sebanyak 7 (tujuh) program utama yaitu :

A. Program Peningkatan Pemahaman Peraturan Perundang-undangan dan Penanganan Pelanggaran Perda

Indikator Program Persentase masyarakat yang memahami peraturan perundang-undangan

B. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Indikator Program Persentase pengamanan pejabat dan asset Pemkab

C. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Indikator Program Persentase tenaga Linmas yang mendapat pelatihan

D. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Indikator Program Persentase satuan Linmas di masyarakat yang terbentuk

E. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Indikator Program Persentase Linmas yang memahami potensi bencana

F. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Indikator Program Persentase penanganan bencana kebakaran

3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember selama Tahun 2020 sebanyak 11 (sebelas) kegiatan yaitu :

A. Program Peningkatan Pemahaman Peraturan Perundang-undangan dan Penanganan Pelanggaran Perda terdiri kegiatan-kegiatan :

1. **Kegiatan Pengawasan dan inventarisasi pelanggaran peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah (PERDA)**

Indikator Keluaran Kegiatan : Jumlah lokasi potensi pelanggaran Perda yang terpantau dan terinventarisasi

2. **Kegiatan Penanganan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah (PERDA)**

Indikator Keluaran Kegiatan : Jumlah penanganan pelanggaran peraturan daerah

B. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal terdiri kegiatan-kegiatan :

1. **Kegiatan** : Pengamanan pejabat dan asset Pemkab

Indikator Keluaran Kegiatan : Terjaganya pejabat dan aset Pemkab Jember dan masyarakat dari berbagai gangguan

C. Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan terdiri kegiatan-kegiatan :

1. **Kegiatan** : Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan

Indikator Keluaran Kegiatan : Jumlah tenaga Linmas yang mendapat pelatihan

D. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan terdiri kegiatan-kegiatan :

1. **Kegiatan** : Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat

Indikator Keluaran Kegiatan : Jumlah Satuan keamanan lingkungan di masyarakat yang terbentuk

E. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam terdiri kegiatan-kegiatan :

1. **Kegiatan** : Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

Indikator Keluaran Kegiatan : Jumlah Linmas peserta pelatihan potensi bencana alam

F. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran terdiri kegiatan-kegiatan :

1. **Kegiatan** : Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

Indikator Keluaran Kegiatan : Jumlah pengadaan sarana prasarana pencegahan bahaya kebakaran

2. **Kegiatan** : Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

Indikator Keluaran Kegiatan : Jumlah Kendaraan operasional dan sarana yang dapat digunakan secara maksimal

3. **Kegiatan** Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

Indikator Keluaran Kegiatan : Jumlah anggota PMK yang melaksanakan piket siaga

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja berisikan janji kepala OPD untuk mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah (5 tahunan) seperti yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Strategis OPD.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember Tahun 2020 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja sasaran, target kinerja sasaran, dan program-program utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran serta anggaran yang disediakan. Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember Tahun 2020 tercantum sebagaimana Dokumen Perjanjian Kinerja pada lampiran.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penegakan peraturan daerah	1. Persentase pelanggaran peraturan daerah	80%
		2. Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani	100%
2.	Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	1. Rasio jumlah Pos kamling per 100 KK	1
		2. Rasio jumlah satlinmas per RT	1
3.	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	1. Persentase penanganan kebakaran sesuai rata-rata waktu respon (<i>Respon Time Rate</i>)	100%

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama OPD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember Nomor : 065/ / 316/2020 Tahun 2020;

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Bidang Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya penegakan peraturan daerah	1. Meningkatkan penegakan peraturan daerah	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda}}{\text{Jumlah Obyek Perda yang terdaftar/Berizin}} \times 100$	Bidang Penegakan Perundang-undangan dan Hukum Daerah; Bidang Tibum dan Tranmas	Data Pelanggaran Perda
	2. Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran peraturan daerah yang tertangani}}{\text{Jumlah pelanggaran Perda yang masuk/ dilaporkan}} \times 100$		
Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	1. Rasio jumlah Pos kamling per 100 KK	$\frac{(\text{Jumlah Pos Kamling} \times 100)}{\text{Jumlah Warga}}$	Bidang Perlindungan Masyarakat	➤ Data Poskamling ➤ Data warga
	2. Rasio jumlah satlinmas per RT	$\frac{\text{Jumlah Satlinmas}}{\text{Jumlah RT}}$		➤ Data Poskamling Data warga
Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase penanganan kebakaran sesuai rata-rata waktu respon (<i>Respon Time Rate</i>)	$\frac{\text{Jumlah Respon time kejadian kebakaran}}{\text{Jumlah Kejadian Kebakaran}}$	Bidang Perlindungan Masyarakat	Data respon penanganan kebakaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan. Penilaian atas hasil pengukuran capaian sasaran menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

No	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1.	Lebih dari 100 %	SANGAT BAIK
2.	76 % s/d 100 %	BAIK
2.	55 % s/d 75 %	CUKUP
3.	Kurang dari 55 %	KURANG

Adapun rincian pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Meningkatnya penegakan peraturan daerah	1	Persentase pelanggaran peraturan daerah	80 %	37,5%	37,5%
		2	Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani	100 %	100 %	100 %
2	Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	1	Rasio jumlah Pos kamling per 100 KK	1	0,19	0,19
		2	Rasio jumlah satlinmas per RT	1	0,67	0,67

3	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	1	Persentase penanganan kebakaran sesuai rata-rata waktu respon (<i>Respon Time Rate</i>)	100 %	80,95%	80,95%
---	--	---	---	-------	--------	--------

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember tahun 2020 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember Tahun 2020, dilakukan evaluasi dan analisis capaian terhadap 5 (lima) indikator kinerja dari 3 (tiga) sasaran. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut:

1. Tujuan 1

Sasaran 1: Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran 1

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	
				Th. 2017 (n-1)	Th. 2020 (n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah	1. Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah	80 %	100 %	100 %
		2. Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah yang tertangani	100 %	100 %	100 %

Sumber Data: Bidang PPHD Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI Th. 2020	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah	1. Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah	80 %	100 %	
		2. Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah yang tertangani	100 %	100 %	

Sumber Data: Bidang PPHD Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th.2020	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah	1. Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah	100 %		
		2. Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah yang tertangani	100 %		

Sumber Data: * data realisasi nasional tidak tersedia

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar 100 %, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah **baik** atau **berhasil**, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat diukur dengan semakin menurunnya tingkat pelanggaran masyarakat terhadap Perda maupun peraturan perundang-undangan yang ada. Secara umum, keadaan yang aman dan nyaman di Kabupaten Jember mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan memiliki kesadaran yang baik terhadap Peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi keadaan yang aman dan nyaman ini ternyata tidak berjalan linier dengan keadaan yang tertib, teratur sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati fasilitas umum bagi pejalan kaki (misalnya: di trotoar) menjadi tolak ukur kurang maksimalnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memilih dan memilah antara Hak dia sebagai pengguna jalan dan kewajibannya sebagai masyarakat Kab. Jember yang juga bertanggung jawab menjaga dan kelestarian, ketertiban dan keindahan Kabupaten Jember secara bersama-sama seluruh elemen masyarakat yang ada.

2. Tingkat Pelanggaran Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Sebenarnya apabila dilihat dari kasus yang ada serta yang ditangani di tahun 2020 ini hampir sama dengan tahun 2019.

Peningkatan pelanggaran Peraturan disebabkan antara lain:

1. Seringkali kegiatan Pasukan Siaga (Ton Siaga) Satpol PP melakukan razia disela-sela aktivitas patroli rutin yang dilakukan setiap harinya.
2. Gaya hidup bebas dan hedonisme memicu perilaku masyarakat yang menyimpang dan cenderung mudah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.
3. Kondisi Masyarakat yang Aman, Tertib dan Nyaman.

Secara umum Trantibum (Ketentraman dan Ketertiban umum) masyarakat Jember dalam keadaan yang baik, aman, tentram dan nyaman.

Walaupun pada tahun 2020 ada beberapa kejadian yang mengganggu keamanan, ketentraman dan kenyamanan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di Kabupaten Jember, salah satunya adalah pelaksanaan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Jember, namun berbagai kejadian itu dapat diatasi sehingga tidak menjadi konflik masyarakat yang meluas dan berkelanjutan.

Keamanan yang lain maupun komunikasi yang intensif antar kelompok masyarakat yang ada, telah menghasilkan kondisi masyarakat Jember yang kondusif kembali.

Namun demikian, dimasa yang akan datang, sebisa mungkin bibit-bibit yang mengancam ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat sebaiknya diantisipasi sedini mungkin, agar tidak terjadi kembali apalagi meluas dan berkelanjutan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 1** terdiri dari 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pemahaman Peraturan Perundang-undangan dan Penanganan Pelanggaran Perda
 - a. Kegiatan Pengawasan dan inventarisasi pelanggaran peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah (PERDA)

		Target	Realisasi
Input	:	139.600.000,-	0
Output	:	6 Titik	0
Outcome	:	6 Titik	0
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan	:	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena terkendala adanya pandemi covid 19 dan belum dapat dipenuhinya persyaratan administrasi	

- b. Kegiatan Penanganan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah (PERDA)

		Target	Realisasi
Input	:	105.100.000,-	33.963.500
Output	:	30 Kegiatan	12 Kegiatan
Outcome	:	30 Kegiatan	12 Kegiatan
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan	:	- Tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena adanya pandemi covid-19	

2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

- b. Kegiatan pengamanan pejabat dan asset Pemkab

		Target	Realisasi
Input	:	488.375.000	132.600.000
Output	:	960 OB	307 OB
Outcome	:	960 OB	307 OB
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan	:	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya pandemi covid-19 sehingga harus mengikuti anjuran untuk menjaga jarak dan mengurangi kerumunan	

2. Tujuan 1

Sasaran 2 : **Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat .**

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran 2

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	
				Th. 2017	Th. 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

2	Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	1. Rasio jumlah Pos kamling per 100 KK	1	0,19	0,19
		3. Rasio jumlah satlinmas per RT	1	0,64	0,67

Sumber Data: Bidang Linmas Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Jember

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI Th. 2020	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	1. Rasio jumlah Pos kamling per 100 KK 2. Rasio jumlah satlinmas per RT	1 1	0,19 0,67	

Sumber Data: Bidang Linmas Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Jember

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th.2020	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	1. Rasio jumlah Pos kamling per 100 KK 2. Rasio jumlah satlinmas per RT	0,19 0,67		

Sumber Data: Bidang Linmas Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Jember

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar 43 %, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah **kurang. Dengan penjelasan sebagai berikut :**

1. Faktor pendorong keberhasilan kinerja antara lain :

- Membantu meningkatkan keamanan lingkungan melalui partisipasi masyarakat secara aktif yang bermuara pada terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif
- Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) secara optimal agar dapat membantu aparat dalam bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat
- Terbentuknya Satuan Perlindungan Masyarakat di Masyarakat
- Pentingnya menjaga keamanan dan kenyamanan serta meningkatkan kesadaran masyarakat pada lingkungan.
- Mengaktifkan kembali pos kamling yg kurang dan tidak aktif
- Meningkatkan kemampuan serta keterampilan anggota Satlinmas agar memadai saat terjadinya bencana alam
- Membantu terciptanya kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bencana alam guna meminimalisir jatuhnya korban (harta maupun jiwa) saat terjadinya bencana alam

2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja antara lain:

- Sarana dan Prasarana pos kamling yang kurang mendukung dan kurang memadai

- Seragam dan atribut Linmas yang kurang memadai dan masih banyak anggota yang belum mempunyai seragam dan atribut
- Sumber Daya masyarakat (khususnya anggota Linmas) yang kurang memadai dilihat dari tolok ukur tingkat pendidikan
- Alokasi dana yang relative kecil sehingga tidak bisa memenuhi terlaksananya kegiatan

langkah–langkah yang diambil untuk memaksimalkan kegiatan ditahun yang akan datang antara lain :

1. Salah satunya langkah yang diambil dengan mengadakan Lomba poskamling dengan hadiah berupa uang pembinaan dari Pemerintah Kabupaten jember yang bertujuan untuk membangkitkan kembali Pos Kamling yang kurang aktif dan lama tidak beraktivitas.
2. Adapun rencana tindak lanjut dalam melakukan pembinaan terhadap anggota LINMAS yaitu memberikan Seragam Linmas, pelatihan dan pembinaan rutin dimasing-masing kecamatan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 2** terdiri dari 3 (tiga) program dan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - a. Kegiatan penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan

		Target	Realisasi
Input	:	0	0
Output	:	0	0
Outcome	:	0	0
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan	:	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya refocusing anggaran (anggaran dialihkan untuk penanganan covid-19)	

2. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

a. Kegiatan Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat

		Target	Realisasi
Input	:	6.528.153.700	1.172.335.000
Output	:	1.300 OK	885 OK
Outcome	:	1.300 OK	885 OK
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan	:	- Karena adanya pandemic covid-19 mempengaruhi tahapan kampanye, sehingga kegiatan tatap muka ditiadakan dan diganti Vicon.	

Tujuan 1

Sasaran 3 : **Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran**

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran 3

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	
				Th. 2019 (n-1)	Th. 2020 (n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	1. Persentase penanganan kebakaran sesuai rata-rata waktu respon (<i>Respon Time Rate</i>)	100	57,75	80,95

Sumber Data: Bidang Linmas Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Jember

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARANS TRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI Th. 2020	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	1. Persentase penanganan kebakaran sesuai rata-rata waktu respon (<i>Respon Time Rate</i>)	100	80,95%	

Sumber Data: Bidang Linmas Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Jember

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th.2020	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	1. Persentase penanganan kebakaran sesuai rata-rata waktu respon (<i>Respon Time Rate</i>)	80,95%		

Sumber Data: Bidang Linmas Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Jember

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar 80,95 %, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah **baik. Dengan penjelasan sebagai berikut :**

1. **Faktor pendorong keberhasilan** kinerja adalah Semangat dan loyalitas anggota pemadam kebakaran dalam bekerja.
2. **Faktor penghambat keberhasilan kinerja antara lain :**
 - b. Banyaknya sarana dan prasarana yang sudah tidak layak pakai, sehingga membutuhkan penambahan dan peremajaan sarana dan prasarana yang memadai dan bisa menjangkau seluruh kawasan Kabupaten Jember;
Data sarana dan prasarana DAMKAR yang dibutuhkan, keadaan saat ini dan kekurangannya sesuai data tahun 2020, sebagai berikut:

No	Uraian	Kebutuhan Ideal (unit)	Ketersediaan Saat ini (unit)	Kekurangan (unit)	Ket.
1	Damkar Kec. Kota :				
	Baju Tahan Panas	10	3	7	
	Masker Full face	10	6	4	
	Breathing Aparatus	10	3	7	
	Nozzle foam	5	1	4	
	Nozzle Jet	5	1	4	
	Selang	5	4	1	
	Head Lamp	20	3	17	
	Masker kain	20	15	5	
	Couping kombinasi	5	0	5	
2	Damkar Kec. Ambulu:				
	Baju Tahan Panas	10	2	8	
	Masker Full face	10	2	8	
	Breathing Aparatus	10	3	7	
	Nozzle foam	5	1	4	
	Nozzle Jet	5	0	5	
	Selang	5	4	1	
	Head Lamp	20	3	17	
	Masker kain	20	15	5	
	Couping kombinasi	5	1	4	
3	Damkar Kec. Rambipuji:				
	Baju Tahan Panas	10	0	10	
	Masker Full face	10	0	10	
	Breathing Aparatus	10	0	10	
	Nozzle foam	5	1	4	
	Nozzle Jet	5	1	4	
	Selang	5	3	2	
	Head Lamp	20	3	17	
	Masker kain	20	15	5	
	Couping kombinasi	5	0	5	
4	Damkar Kec. Kalisat				
	Baju Tahan Panas	10	0	10	
	Masker Full face	10	0	10	
	Breathing Aparatus	10	0	10	
	Nozzle foam	5	1	4	
	Nozzle Jet	5	1	4	
	Selang	5	3	2	
	Head Lamp	20	3	17	
	Masker kain	20	15	5	
	Couping kombinasi	5	0	5	

c. Diperlukan juga penambahan sarana dan prasarana berupa armada Damkar dengan space/ ukuran yang lebih kecil namun memadai, sehingga mampu menjangkau jalan sempit dan menembus kepadatan jalan sehingga dapat memberikan respon yang lebih cepat dan tepat.

Data armada DAMKAR yang dibutuhkan sesuai dengan Perbup No. 9 tahun 2017, keadaan saat ini dan kekurangannya sesuai data tahun 2020, sebagai berikut:

No	Uraian	Kebutuhan Ideal (unit)	Ketersediaan Saat ini (unit)	Kekurangan (unit)	Keterangan
1	Kendaraan Damkar di Kec. Kota - Truk Damkar	1	1	0	Baik
2	Kendaraan Damkar di Kec. Kalisat - Truk Damkar	1	1	0	Baik
3	Kendaraan Damkar di Kec. Mayang - Truk Damkar	1	0	1	Belum tersedia
4	Kendaraan Damkar di Kec. Ambulu - Truk Damkar	1	1	0	Rusak Berat
5	Kendaraan Damkar di Kec. Rambipuji - Truk Damkar	1	1	0	Kurang Baik
6	Kendaraan Damkar di Kec. Tanggul - Truk Damkar	1	0	1	Belum tersedia
7	Kendaraan Damkar di Kec. Kencong - Truk Damkar	1	0	1	Belum tersedia
Jumlah		7	4	3	

d. Kurangnya posko pemadam kebakaran sedangkan jangkauan wilayah sangat luas, sehingga diperlukan tambahan posko untuk mempersingkat waktu tanggap dan mempercepat waktu pemadaman;

Data Posko DAMKAR yang dibutuhkan sesuai dengan Perbup No. 9 tahun 2017, keadaan saat ini dan kekurangannya sesuai data tahun 2020, sebagai berikut:

Uraian	Kebutuhan Ideal	Ketersediaan Saat ini	Kekurangan
Posko DAMKAR Se- Kab. Jember	7 Titik yang tersebar di Kec. Kota, Kec. Kalisat, Kec. Mayang, Kec. Ambulu, Kec. Rambipuji, Kec. Tanggul, Kec. Kencong	4 Titik yang berada di Kec. Kota, Kec. Kalisat, Kec. Ambulu, Kec. Rambipuji	Yang belum ada di 3 titik di Kec. Mayang, Kec. Tanggul, Kec. Kencong

- e. Dengan penambahan posko berakibat kurangnya personil Damkar;
 Data Personil DAMKAR yang dibutuhkan sesuai dengan Perbup No. 9 tahun 2017, keadaan saat ini dan kekurangannya sesuai data tahun 2020, sebagai berikut:

No	Uraian	Kebutuhan Ideal (Orang)	Ketersediaan Saat ini (Orang)	Kekurangan (Orang)
1	Jumlah Personil Damkar di Kec. Kota	20	19	1
2	Jumlah Personil Damkar di Kec. Kalisat	20	16	4
3	Jumlah Personil Damkar di Kec. Mayang	20	0	20
4	Jumlah Personil Damkar di Kec. Ambulu	20	17	3
5	Jumlah Personil Damkar di Kec. Rambipuji	20	17	3
6	Jumlah Personil Damkar di Kec. Tanggul	20	0	20
7	Jumlah Personil Damkar di Kec. Kencong	20	0	20
	Jumlah	140	69	71

- f. Anggaran yang minim, tetapi dituntut kerja yang maksimal;
 g. Kesejahteraan anggota perlu ditingkatkan.
 h. Kesadaran masyarakat pengguna jalan yang kurang pada saat armada DAMKAR yang melaju cepat dengan beban berat.
 i. Ditahun 2020 ini, kepadatan dijalan raya Kab. Jember makin meningkat sehingga bisa mengurangi laju dan kecepatan respon Damkar terhadap titik kebakaran yang ada.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 3** terdiri dari 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya

- a. Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

		Target	Realisasi
Input	:	15.000.000	11.532.500
Output	:	3 Paket	3 Paket
Outcome	:	3 Paket	3 Paket
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none">- Belanja pengadaan alat pemadam kebakaran- Adanya efisiensi anggaran- Diperlukan untuk memberi rasa aman bagi anggota waktu memadamkan api	

- b. Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

		Target	Realisasi
Input	:	251.400.000	119.070.863
Output	:	14 Unit	14 Unit
Outcome	:	14 Unit	14 Unit
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan	:	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena suku cadang unit kendaraan susah untuk didapat, mengingat unit yang melebihi masa azas manfaat.	

- c. Kegiatan Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

		Target	Realisasi
Input	:	415.728.000	401.658.000
Output	:	16.107 OH	1.152 OH
Outcome	:	16.107 OH	1.152 OH
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Dinamika pengaduan masyarakat cenderung fluktuatif - Mengutamakan pelayanan menyeluruh pada masyarakat 	

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

1. Alokasi Anggaran OPD

Keseluruhan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember tahun 2020 adalah sebesar Rp 19.527.771.142,28, - yang terdiri dari:

- | | | | |
|----|------------------------|-----|--------------------|
| a. | Belanja Tidak Langsung | Rp. | 9.037.354.942,28,- |
| b. | Belanja Langsung | Rp. | 10.490.416.200,- |
| | - Belanja Pegawai | Rp. | 9.025.286.000,- |
| | - Belanja Barang/jasa | Rp. | 1.461.577.200,- |
| | - Belanja Modal | Rp. | 3.553.000,- |

Proporsi Anggaran pada tahun 2020, Belanja Langsung sebesar 53,72% dan Belanja Tidak Langsung sebesar 46,28 %

2. Alokasi Anggaran Belanja langsung

Keseluruhan anggaran belanja langsung perprogram dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember tahun 2020 terdiri dari:

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.858.938.000	1.955.7683.155	105,21
1	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	55.000.000	45.027.155	81,87
2	Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor	1.187.080.000	1.384.878.000	116,66
3	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	14.500.000	4.990.000	34,41
4	Penunjang Administrasi & Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	602.358.000	520.888.000	86,47
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	317.260.000	147.958.300	46,64
1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	51.400.000	13.452.550	26,17
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas / Operasional	265.860.000	134.505.750	50,59
V	Program peningkatan pemahaman peraturan perundang-undangan dan penanganan pelanggaran Perda	244.700.000	33.963.500	13,08
1	Pengawasan dan inventarisasi pelanggaran peraturan perundang-undangan dan peraturan	139.600.000	0	0
2	Penanganan pelanggaran perundang-undangan dan Peraturan Daerah (PERDA)	105.100.000	33.963.500	32,84
VII	Program Peningkatan Disiplin dan Penguatan Wawasan Kebangsaan	370.861.500	140.009.500	37,75
1	Penyelenggaraan Peringatan Dan Upacara Hari-Hari Besar Nasional	370.861.500	140.009.500	37,75

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
VIII	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	0	0	0
1	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	0	0	0
IX	Program Pemeliharaan Kanrantibmas & Pencegahan Tindak Kriminal	488.375.000	132.600.000	27,15
1	Pengamanan Pejabat dan Aset Pemkab	488.375.000	132.600.000	27,15
X	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	6.528.153.700	1.172.335.000	17,96
1	Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	6.528.153.700	1.172.335.000	17,96
XI	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	0	0	0
1	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	0	0	0
XII	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	0	0	0
1	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	0	0	0
XIII	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	682.128.000	632.261.363	78,03
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	15.000.000	11.532.500	76,88

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	251.400.000	119.070.863	47,36
3	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	415.728.000	401.658.000	96,62
	JUMLAH	19.527.771.142,28	11.904.870.646	60,96

Dari tabel diatas bahwa capaian realisasi sebesar **60,96%**, secara umum berbagai program dan kegiatan yang ada telah memberikan tingkat serapan yang cukup baik.

3. Alokasi Belanja Langsung Per Sasaran Pembangunan

Untuk mengetahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran disajikan dalam tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir:

Berdasarkan tabel RKT 2020, dapat diuraikan proporsi alokasi anggaran belanja langsung sebagai berikut:

a. Untuk Sasaran Starategis I Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah Didukung oleh :

- Program Peningkatan Pemahaman Peraturan Perundang-undangan dan Penanganan Pelanggaran Perda dengan Anggaran Rp. 244.700.000,-
- Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan Anggaran Rp. 488.375.000,-

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 733.075.000,- yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 6,98 % dari keseluruhan belanja langsung Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

b. Untuk Sasasaran Strategis II Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat .

Didukung oleh :

- Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan Anggaran Rp. 0,- (refocusing)
- Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan Anggaran Rp. 6.528.153.700,-

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 6.528.153.700,- yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 62,23 % dari keseluruhan belanja langsung Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

- c. Untuk Sasaran Strategis III Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran.

Didukung oleh :

- Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dengan Anggaran Rp. 682.128.000,-

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 682.128.000,- yang dialokasikan untuk sasaran III adalah sebesar 6,50 % dari keseluruhan belanja langsung Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

BAB IV

PENUTUP

Dalam tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan /pembangunan Kabupaten Jember merupakan rangkaian kebijakan, program, kegiatan yang terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan guna mewujudkan sasaran pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember..tahun 2016-2021

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan cukup karena dari 5 (lima) indikator sasaran pencapaiannya sebanyak 2 (dua) indikator dalam kategori baik, 2 (dua) indikator dalam kategori cukup dan 1 (satu) indikator dalam kategori kurang. .

Sedangkan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar **Rp.11.904.870,- (60,96%)** meliputi belanja tidak langsung sebesar **Rp. 7.789.959.828,- (86,20%)** dan Belanja langsung sebesar **Rp. 4.144.910.818,- (39,23%)**.

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Rendahnya pengetahuan, pemahaman dan penguasaan terhadap peraturan daerah yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja maupun pelaksanaan tugas-tugas dilapangan dari beberapa personil Satpol PP.
2. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Menganggap bahwa Peraturan Daerah hanya akan berlaku saat petugas ada, menjadikan seakan-akan persoalan yang telah diatur didalam Perda hanya dapat dioptimalkan apabila langsung dilakukan pengawalan dan pengawasan secara kontinu oleh personil Satpol PP.

3. Kurangnya tingkat kesejahteraan anggota Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan masih kurang maksimal.
4. Belum adanya regulasi yang benar-benar sangat memihak kepada aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas-tugas dilapangan, hal ini berdampak terhadap sanksi para pelaku pelanggaran Perda dan peraturan Perundang-undangan yang tidak/kurang memberikan efek jera terhadap pelakunya.
5. Sarana dan Prasarana pos kamling yang kurang mendukung dan kurang memadai
6. Sumber Daya masyarakat (khususnya anggota Linmas) yang kurang memadai dilihat dari tolak ukur tingkat pendidikan, begitu juga seragam dan atribut Linmas yang kurang memadai dan masih banyak anggota yang belum mempunyai seragam dan atribut
7. Kurangnya posko Pemadam Kebakaran yang mampu menjangkau dan merespon dengan lebih cepat dan tepat, serta jumlah personil dan sarana prasarana yang ada masih sangat terbatas.
8. Pandemi covid-19 yang melanda sejak awal tahun 2020 menyebabkan terjadi pemangkasan anggaran dan refofusing ke kegiatan lain serta adanya banyak pembatasan social akibat pandemi menyebabkan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan terhambat.

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan rencana aksi yang lebih efektif serta menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan kendala yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2020 dan tahun – tahun berikutnya antara lain melalui :

1. Meningkatkan kualitas aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja dengan berbagai kegiatan pelatihan dan pementapan anggota.
2. Mengadakan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah (PERDA) kepada anggota masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
3. Meningkatkan tingkat kesejahteraan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dimulai dari peningkatan honor/gaji anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang masih belum berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

4. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi menyeluruh dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam penerbitan dan pembuatan regulasi/peraturan dalam rangka memperkuat peran dan fungsi serta memberikan sanksi yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran Perda.
5. Salah satunya langkah yang diambil dengan mengadakan Lomba poskamling dengan hadiah berupa uang pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Jember yang bertujuan untuk membangkitkan kembali Pos Kamling yang kurang aktif dan lama tidak beraktivitas..
6. Meningkatkan kemampuan serta keterampilan anggota Satlinmas agar memadai dengan jalan mengadakan pembinaan rutin, pelatihan terhadap anggota LINMAS di masing-masing kecamatan dan memberikan Seragam
7. Menambah jumlah posko Pemadam Kebakaran yang lebih banyak lagi, termasuk personil maupun sarana dan prasarana agar bisa menjangkau dan merespon lebih cepat dan tepat apabila terjadi kebakaran.
8. Ditahun 2021 semoga pandemi covid-19 segera berlalu, apalagi dengan adanya vaksin yang telah didistribusikan secara merata keseluruh masyarakat, diharapkan aktivitas new normal dapat kembali berjalan untuk merealisasikan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Demikian Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember yang menggambarkan capaian Kinerja tiap-tiap Tujuan dan Sasaran pada tahun 2020 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2021.

RENCANA STRATEGIS

**MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JEMBER**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran			
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Mengelola situasi kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman	1	1. Meningkatnya Penegakan Pelanggaran Peraturan Daerah 2. Meningkatkan peran Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	1	% Pelanggaran Perda	100	100	100	100	100	100	Penguatan Sumber Daya Aparatur Satpol PP untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dengan melakukan pendekatan humanitas dan represif dalam menjaga ketentraman dan ketertiban yang ada di masyarakat melalui peneggakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Kebijakan Kepala Daerah	Peningkatan penyelenggaraan pemerintah melalui penegakan Peraturan Daerah, Peraturam Bupati dan Kebijakan Kepala Daerah yang konsisten dan konsekuen namun mengedepankan humanitas dalam menjalankan tupoksi	Program peningkatan pemahaman peraturan perundang-undangan dan penanganan pelanggaran Perda
				2	% Pelanggaran Perda yang tertangani	100	100	100	100	100	100			Program Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)
				1	Rasio Pos Kamling per 100 KK	1	1	1	1	1	1			Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
				2	Rasio Linmas Per RT	1	1	1	1	1	1			Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
														Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
														Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			3. Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	1 Persentase Penanganan Kebakaran sesuai rata-rata waktu respon (<i>Respon Time Rate</i>)	100	100	100	100	100	100			Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN JEMBER


Drs. SUPRAPTO, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610721 198603 1 011

TABEL 4.1
MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JEMBER

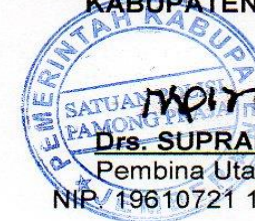
No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Mengelola situasi kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman	1. Persentase Penegakan pelanggaran Peraturan Daerah	1. Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah	1. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	4	4	4	4	4	4	Penguatan Sumber Daya Aparatur Satpol PP untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dengan melakukan pendekatan humanitas dan represif dalam menjaga ketentraman dan ketertiban yang ada di masyarakat melalui penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Kebijakan Kepala Daerah	Peningkatan penyelenggaraan pemerintah melalui penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Kebijakan Kepala Daerah yang konsisten dan konsekuen namun mengedepankan humanitas dalam menjalankan tupoksi	Program peningkatan pemahaman peraturan perundang-undangan dan penanganan pelanggaran Perda
				2. Rasio Polisi Pamong Praja (per 10.000 penduduk)	3	3	3	3	3				
				3. % Penanganan Pelanggaran Perda No. 12 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kab. Dati II Jember.	100	100	100	100	100				
				4. % Penanganan Pelanggaran Perda No. 14 Tahun 2001 tentang Penanganan Prostitusi di Kab. Jember	100	100	100	100	100				
				5. % Penanganan Pelanggaran Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima	100	100	100	100	100	Program Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)			
												Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran			
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				6	% Penanganan Pelanggaran Perda No. 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Jember No. 8 Tahun 2003 tentang usaha kepariwisataan	100	100	100	100	100	100			
				7	% Penanganan Pelanggaran Perda No. 12 Tahun 2006 tentang Izin mendirikan bangunan	100	100	100	100	100	100			
				8	% Penanganan Pelanggaran Perda No. 4 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	100	100	100	100	100	100			
				9	% Penanganan Pelanggaran Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Rumah Pemdondokan	100	100	100	100	100	100			
				10	% Penanganan Pelanggaran Perda No. 13 Tahun 2008 tentang Pengendalian Penebangan Pohon di luar kawasan hutan kab. Jember	100	100	100	100	100	100			
				11	% Penanganan Pelanggaran Perda No. 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	100	100	100	100	100	100			
				12	% Penanganan Pelanggaran Perda No. 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	100	100	100	100	100	100			
				13	% Penanganan Pelanggaran Perda No. 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	100	100	100	100	100	100			

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran			
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				14	% Penanganan Pelanggaran Perda No. 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	100	100	100	100	100	100			
				15	% Penanganan Pelanggaran Perda No. 08 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di kab. Jember	100	100	100	100	100	100			
				16	% Penanganan Pelanggaran Perda No. 06 Tahun 2016 tentang Tanggung jawab sosial dan lingkungan sosial	100	100	100	100	100	100			
				17	% Penanganan Pelanggaran Perda No. 07 Tahun 2016 tentang Desa	100	100	100	100	100	100			
				18	% Penanganan Pelanggaran Perda No. 09 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung	100	100	100	100	100	100			

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2. Meningkatkan peran Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	19 Rasio Jumlah Pos Kamling per 100 KK	20	30	40	60	80	100			Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
				Rasio Jumlah Satlinmas per RT	41	50	50	50	50	50			Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
			Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	% Penanganan kebakaran sesuai rata-rata waktu response (Response Time Rate	100	100	100	100	100	100			Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
													Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN JEMBER**



Drs. SUPRAPTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610721 198603 1 011

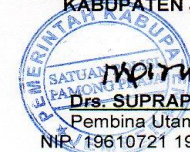
TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN
Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan Tahun 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode Renstra (tahun 2021)		Bidang	
							target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah		target capaian
Meningkatkan kehidupan masyarakat yg aman dan tertib dalam rangka mewujudkan Jember Kuat dan Bersih	Jumlah pelanggaran Perda, jumlah jejaring Satlinmas	1. Prosentase pelanggaran perda 2. Prosentase pelanggaran perda yang tertangani 3. meningkatkan peran Satlinmas dalam perlindungan masyarakat 4. meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional Satpol PP	89,43%	20%	554,598,500	20%	2,059,254,356	20%	2,071,512,667	20%	2,096,512,667	20%	2,196,512,667	20%	2,396,512,667	100%	11,374,903,524	TU	
			01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional		63,09%	20%	75,700,000	20%	56,200,000	20%	56,200,000	20%	56,200,000	20%	56,200,000	20%	56,200,000	100%	356,700,000	TU	
			01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		99,38%	20%	107,800,000	0%	-	0%	-	0%	-	20%	100,000,000	20%	300,000,000	100%	507,800,000	TU	
			01.18	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		99,54%	20%	75,000,000	20%	62,741,689	20%	75,000,000	20%	75,000,000	20%	75,000,000	20%	75,000,000	100%	437,741,689	TU	
			01.19	Penyediaan tenaga pendukung kelancaran operasional kantor		54,76%	0%	-	20%	1,017,720,000	20%	1,017,720,000	20%	1,017,720,000	20%	1,017,720,000	20%	1,017,720,000	100%	5,088,600,000	TU	
			01.20	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		77,50%	20%	29,000,000	20%	15,000,000	20%	15,000,000	20%	40,000,000	20%	40,000,000	20%	40,000,000	100%	179,000,000	TU	
			01.27	Penunjang administrasi dan operasional rutin kantor/ kedinasan		92,53%	20%	267,098,500	20%	907,592,667	20%	907,592,667	20%	907,592,667	20%	907,592,667	20%	907,592,667	100%	4,805,061,835	TU	
			02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tingkat kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja sesuai standart daerah	81,40%	20%	479,210,000	20%	212,364,388	20%	303,051,053	20%	330,347,794	20%	367,623,202	20%	460,610,000	100%	2,153,206,437	TU	
			02.23	Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan		78,15%	20%	73,600,000	20%	55,000,000	20%	55,000,000	20%	55,000,000	20%	55,000,000	20%	55,000,000	100%	348,600,000	TU	
			02.24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional		64,04%	20%	405,610,000	20%	157,364,388	20%	248,051,053	20%	275,347,794	20%	312,623,202	20%	405,610,000	100%	1,804,606,437	TU	
			03	Program Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	88,08%	20%	1,208,652,500	20%	910,294,279	20%	642,828,572	20%	700,730,121	20%	779,798,307	20%	885,420,334	100%	5,127,724,113	TU	
			03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		97,22%	20%	666,495,000	20%	480,294,279	20%	566,495,000	20%	566,495,000	20%	566,495,000	20%	566,495,000	100%	3,412,769,279	TU	
			03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan/ pakaian korpri/ pakaian olah raga/ pakaian khusus hari-hari tertentu		54,29%	0%	-	25%	-	25%	76,333,572	25%	134,235,121	25%	213,303,307	25%	318,925,334	100%	742,797,334	TU	
			03.05	Penyelenggaraan peringatan dan upacara hari-hari besar nasional		90,71%	50%	542,157,500	100%	430,000,000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	972,157,500	TU	
			03.06	Lomba budaya dan disiplin kerja		0,00%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	TU
			06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase tertib laporan akuntabilitas kinerja pemerintah	100,00%	20%	12,150,000	20%	5,489,845	20%	7,683,626	20%	8,375,714	20%	9,320,803	20%	11,778,570	100%	54,798,558	TU	
			06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja (LAKIP) dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		100,00%	20%	4,400,000	20%	2,500,000	20%	3,500,000	20%	3,500,000	20%	3,500,000	20%	4,500,000	100%	21,900,000	TU	
			06.05	Penyusunan RAK dan RAPBD		100,00%	20%	7,750,000	20%	2,989,845	20%	4,183,626	20%	4,875,714	20%	5,820,803	20%	7,278,570	100%	32,898,558	TU	
			08	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga Aparatur Pemerintah	Presentase penyelesaian dokumen perencanaan	0,00%	20%	6,950,000	20%	3,140,282	20%	4,395,160	20%	4,791,046	20%	5,331,653	20%	6,737,536	100%	31,345,677	TU	
			08.06	Penyusunan renstra, RKPd dan dokumen perencanaan lainnya			20%	6,950,000	20%	3,140,282	20%	4,395,160	20%	4,791,046	20%	5,331,653	20%	6,737,536	100%	31,345,677	TU	

15	Program Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase tenaga Linmas yang mendapat pelatihan	95,53%	20%	-	0%	81,623,100	87,919,546	101,893,636	121,459,607	146,802,249	100%	539,698,138	Linmas				
15.01	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan		91,54%	28%	-	18%	55,000,000	79,520,781	79,520,781	79,520,781	79,520,781	100%	373,083,124	Linmas				
15.02	Pembangunan pos jaga/ ronda		0.00%	0%	-	70%	6,000,000	6,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	42,000,000	Linmas				
15.05	Pengendalian keamanan lingkungan		96,80%	50%	-	50%	-	0%	-	0%	-	100%	-	Linmas				
15.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		0.00%	0%	-	0%	20,623,100	2,398,765	12,372,855	31,938,826	57,281,468	100%	124,615,014	Linmas				
16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase pengamanan pejabat dan aset Pemkab	78,09%		1,246,800,000		1,001,450,000	829,678,521	904,301,322	1,006,339,843	1,271,697,740	100%	6,260,267,426	Tribum				
16.01	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja		0.00%	0%	-	25%	45,000,000	0%	-	45,000,000	45,000,000	100%	175,000,000	Tribum				
16.03	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/ POLRI/ dan kejaksanaan		0.00%	0%	-	100%	40,000,000	0%	-	0%	-	100%	60,000,000	Tribum				
16.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		64,19%	20%	-	25%	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100%	75,000,000	Tribum				
16.06	Pemantauan pelanggaran perda		86,36%	20%	104,000,000	20%	100,000,000	0%	-	-	-	100%	204,000,000	Tribum				
16.07	Pengamanan pejabat dan aset Pemkab			20%	1,142,800,000	20%	801,450,000	814,678,521	844,301,322	946,339,843	1,196,697,740	100%	5,746,267,426	Tribum				
19	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase satuan Linmas di masyarakat yang terbentuk	91,20%		27,125,000		68,200,000	73,460,982	85,137,002	101,485,305	122,660,294	100%	478,068,583	Linmas				
19.01	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat		91,20%	1%	27,125,000	35%	68,200,000	73,460,982	85,137,002	101,485,305	122,660,294	100%	478,068,583	Linmas				
20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Persentase masyarakat yang memahami bahaya penyakit masyarakat		20%	-	20%	67,775,869	74,591,979	86,447,762	103,047,762	124,548,758	100%	456,412,130	Perundang-undangan				
20.01	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras/ narkoba		0.00%	20%		20%	30,000,000	30,000,000	50,000,000	50,000,000	65,000,000	100%	225,000,000	Perundang-undangan				
20.02	Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi		0.00%	20%		20%	37,775,869	44,591,979	36,447,762	53,047,762	59,548,758	100%	231,412,130	Perundang-undangan				
22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Linmas yang memahami potensi bencana	90,75%		-		96,461,700	103,902,803	120,417,301	143,540,250	173,490,036	100%	637,812,090	Linmas				
22.01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam		90,75%	0%	-	25%	96,461,700	103,902,803	120,417,301	143,540,250	173,490,036	100%	637,812,090	Linmas				
10	Program Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)	Persentase PKL yang telah tertibkan	0.00%		-		-	317,385,152	367,830,916	438,462,089	529,948,756		1,653,626,913	Perundang-undangan				
10.1	Pendataan, penataan, dan penertiban pedagang kaki lima		0.00%	0%	-	0%	-	33%	317,385,152	33%	367,830,916	33%	438,462,089	33%	529,948,756	100%	1,653,626,913	Perundang-undangan
09	Program Peningkatan Pemahaman Peraturan Perundang-undangan dan Penanganan Pelanggaran Perda	Persentase masyarakat yang memahami peraturan perundang-undangan			-			84,090,705	97,456,232	116,170,117	140,409,104		438,126,158	Perundang-undangan				
09.1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah (PERDA)		0.00%	0%	-	0%	-	33%	20,000,000	33%	20,000,000	33%	30,000,000	33%	40,000,000	100%	110,000,000	Perundang-undangan

09.2	Pengawasan dan inventarisasi pelanggaran peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah		0.00%	0%	-	0%	-	33%	20,000,000	33%	20,000,000	33%	30,000,000	33%	40,000,000	100%	110,000,000	Perundang-undangan
09.3	Penanganan pelanggaran perundang-undangan dan Peraturan Daerah (PERDA)		0.00%	0%	-	0%	-	33%	44,090,705	33%	57,456,232	33%	56,170,117	33%	60,409,104	100%	218,126,158	Perundang-undangan
11	Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan Penguatan Wawasan Kabangsaan	Persentase peningkatan disiplin aparatatur Satpol PP	0.00%	20%	-	20%	-	25%	380,788,539	25%	441,311,751	25%	476,221,625	25%	527,742,270	100%	1,826,064,185	Tribum
11.1	Penyelenggaraan apel besar, upacara bulanan, peringatan dan upacara hari-hari besar nasional		0.00%	0%	-	0%	-	25%	315,611,000	25%	380,000,000	25%	391,000,000	25%	397,000,000	100%	1,483,611,000	Tribum
11.2	Lomba kedisiplinan, kecakapan dan ketangkasan		0.00%	20%	-	20%	-	20%	65,177,539	20%	61,311,751	20%	85,221,625	20%	130,742,270	100%	342,453,185	Tribum
28	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase penanganan bencana kebakaran	90.00%	0%	-	20%	846,187,000	20%	911,462,288	20%	1,056,331,735	20%	1,139,892,635	20%	1,263,213,376	100%	5,217,087,034	DAMKAR
28.1	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran		90.00%	0%	-	20%	115,500,000	20%	227,858,288	20%	264,085,735	20%	284,974,635	20%	313,806,376	100%	1,206,225,034	DAMKAR
28.2	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran		90.00%	0%	-	20%	184,450,000	20%	182,300,000	20%	211,266,000	20%	227,978,000	20%	252,640,000	100%	1,058,634,000	DAMKAR
28.3	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran		90.00%	0%	-	20%	546,237,000	20%	501,304,000	20%	580,980,000	20%	626,940,000	20%	696,767,000	100%	2,952,228,000	DAMKAR
JUMLAH							3,535,486,000		5,352,240,819		5,892,751,593		6,401,884,999		7,005,205,865		8,061,571,690	36,249,140,966

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN JEMBER**


Drs. SUPRAPTO, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610721 198603 1 011

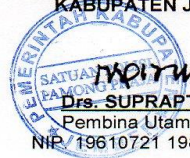
06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase tertib laporan akuntabilitas kinerja pemerintah	100.00%	20%	12,150,000	20%	5,489,845	20%	7,683,626	20%	8,375,714	20%	9,320,803	20%	11,778,570	100%	54,798,558	TU
06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja (LAKIP) dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		100.00%	20%	4,400,000	20%	2,500,000	20%	3,500,000	20%	3,500,000	20%	3,500,000	20%	4,500,000	100%	21,900,000	TU
06.05	Penyusunan RAK dan RAPBD		100.00%	20%	7,750,000	20%	2,989,845	20%	4,183,626	20%	4,875,714	20%	5,820,803	20%	7,278,570	100%	32,898,558	TU
08	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga Aparatur Pemerintah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan	0.00%	20%	6,950,000	20%	3,140,282	20%	4,395,160	20%	4,791,046	20%	5,331,653	20%	6,737,536	100%	31,345,677	TU
08.06	Penyusunan renstra, RKPD dan dokumen perencanaan lainnya			20%	6,950,000	20%	3,140,282	20%	4,395,160	20%	4,791,046	20%	5,331,653	20%	6,737,536	100%	31,345,677	TU
15	Program Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase tenaga Linmas yang mendapat pelatihan	95,53%	20%	1,221,650,000	0%	767,954,811		186,705,781		186,705,781		186,705,781		186,705,781	100%	2,736,427,935	Linmas
15.01	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan		91,54%	28%	105,080,000	18%	55,000,000	18%	79,520,781	18%	79,520,781	18%	79,520,781	18%	79,520,781	100%	478,163,124	Linmas
15.02	Pembangunan pos jaga/ ronda		0.00%	0%	-	70%	30,000,000	10%	45,000,000	10%	45,000,000	10%	45,000,000	10%	45,000,000	100%	210,000,000	Linmas
15.05	Pengendalian keamanan lingkungan		96,80%	50%	1,116,570,000	50%	682,954,811	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	1,799,524,811	Linmas
15.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		0.00%	0%	-	0%	-	33%	62,185,000	33%	62,185,000	33%	62,185,000	33%	62,185,000	100%	248,740,000	Linmas
16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase pengamanan pejabat dan asset pemkab	78,09%		1,246,800,000		1,228,912,048		829,578,621		904,301,322		1,006,339,843		1,271,697,740	100%	6,487,629,574	Tribum
16.01	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja		0.00%	0%	-	25%	45,000,000	0%	-	25%	45,000,000	25%	45,000,000	25%	40,000,000	100%	175,000,000	Tribum
16.03	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/ POLRI/ dan kejaksaan		0.00%	0%	-	100%	40,000,000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	20,000,000	100%	60,000,000	Tribum
16.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		64,19%	20%	-	25%	15,000,000	25%	15,000,000	25%	15,000,000	25%	15,000,000	25%	15,000,000	100%	75,000,000	Tribum
16.06	Pemantauan pelanggaran perda		86,36%	20%	104,000,000	20%	100,000,000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	204,000,000	Tribum
16.07	Pengamanan pejabat dan asset Pemkab			20%	1,142,800,000	20%	1,028,912,048	20%	814,578,621	20%	844,301,322	20%	946,339,843	20%	1,196,697,740	100%	5,973,629,574	Tribum
19	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase satuan linmas di masyarakat yang terbentuk	91,20%		27,125,000		1,068,615,341		809,483,568		882,396,246		981,963,067		1,240,893,145	100%	5,010,476,367	Linmas
19.01	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat		91,20%	1%	27,125,000	35%	1,068,615,341	35%	809,483,568	35%	882,396,246	35%	981,963,067	35%	1,240,893,145	100%	5,010,476,367	Linmas

20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Persentase masyarakat yang memahami bahaya penyakit masyarakat		20%	150,000,000	20%	67,775,869	20%	94,859,577	20%	103,403,871	20%	115,071,639	20%	145,414,439	100%	676,525,395	Perundang-undangan
20.01	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras/ narkoba		0.00%	20%	75,000,000	20%	30,000,000	20%	30,000,000	20%	50,000,000	20%	50,000,000	20%	65,000,000	100%	300,000,000	Perundang-undangan
20.02	Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi		0.00%	20%	75,000,000	20%	37,775,869	20%	64,859,577	20%	53,403,871	20%	65,071,639	20%	80,414,439	100%	376,525,395	Perundang-undangan
22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Linmas yang memahami potensi bencana	90,75%		-		96,194,290		134,634,198		146,761,114		163,321,178		206,386,713		747,297,493	Linmas
22.01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam		90,75%	0%	-	25%	96,194,290	25%	134,634,198	25%	146,761,114	25%	163,321,178	100%	206,386,713	100%	747,297,493	Linmas
	Program Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)	Persentase PKL yang telah ditertibkan	0.00%		-		-		429,397,685		468,074,857		520,890,954		658,242,694		2,076,606,190	Perundang-undangan
	Pendataan, penataan, dan penertiban pedagang kaki lima		0.00%	0%	-	0%	-	33%	429,397,685	33%	468,074,857	33%	520,890,954	33%	658,242,694	100%	2,076,606,190	Perundang-undangan
	Program Peningkatan Pemahaman Peraturan Perundang-undangan dan Penanganan Pelanggaran Perda	Persentase masyarakat yg memahami peraturan perundang-undangan dimasyarakat			-				113,768,253		124,015,710		138,009,253		174,400,384		550,193,600	Perundang-undangan
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah (PERDA)		0.00%	0%	-	0%	-	33%	30,000,000	33%	30,000,000	33%	30,000,000	33%	40,000,000	100%	130,000,000	Perundang-undangan
	Pengawasan dan inventarisasi pelanggaran peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah		0.00%	0%	-	0%	-	33%	30,000,000	33%	30,000,000	33%	30,000,000	33%	40,000,000	100%	130,000,000	Perundang-undangan
	Penanganan pelanggaran perundang-undangan dan Peraturan Daerah (PERDA)		0.00%	0%	-	0%	-	33%	53,768,253	33%	64,015,710	33%	78,009,253	33%	94,400,384	100%	290,193,600	Perundang-undangan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan Penguatan Wawasan Kabangsaan	Persentase peningkatan disiplin aparatir Satpol PP	0.00%	20%	814,642,450	20%	368,087,330	25%	515,177,588	25%	561,581,220	25%	624,948,281	25%	789,738,499	100%	3,674,175,368	Tribum
	Penyelenggaraan apel besar, upacara bulanan, peringatan dan upacara hari-hari besar nasional		0.00%	0%	-	0%	-	25%	450,000,000	25%	500,000,000	25%	550,000,000	25%	650,000,000	100%	2,150,000,000	Tribum
	Lomba kedisiplinan, kecakapan dan ketangkasan		0.00%	20%	814,642,450	20%	368,087,330	20%	65,177,588	20%	61,581,220	20%	74,948,281	20%	139,738,499	100%	1,524,175,368	Tribum
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase penanganan bencana kebakaran	90.00%	0%	-	20%	846,187,000	20%	2,200,000,000	20%	2,200,000,000	20%	2,200,000,000	20%	2,200,000,000	100%	9,646,187,000	DAMKAR
	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran		90.00%	0%	-	20%	115,500,000	20%	500,000,000	20%	500,000,000	20%	500,000,000	20%	500,000,000	100%	2,115,500,000	DAMKAR

	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran		90.00%	0%	-	20%	184,450,000	20%	450,000,000	20%	450,000,000	20%	450,000,000	20%	450,000,000	100%	1,984,450,000	DAMKAR	
	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran		90.00%	0%	-	20%	546,237,000	20%	1,250,000,000	20%	1,250,000,000	20%	1,250,000,000	20%	1,250,000,000	100%	5,546,237,000	DAMKAR	
	JUMLAH						5,721,778,450		7,634,269,839		8,343,076,349		8,717,997,463		9,295,836,628		10,634,538,502		50,347,497,231

Jember, Januari 2020

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN JEMBER**


Drs. SUPRAPTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610721 198603 1 011

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JEMBER**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya penegakan peraturan daerah	1. Persentase pelanggaran peraturan daerah 2. Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani	80% 100%
2.	Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	1. Rasio jumlah Pos kamling per 100 KK 2. Rasio jumlah satlinmas per RT	1:100 1:1
3.	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase penanganan kebakaran sesuai rata-rata waktu respon (<i>Respon Time Rate</i>)	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1,858,938,000 Perubahan Penggunaan APBD
	01.18 Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember	55,000,000	
	01.19 Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember	1,187,080,000	
	01.20 Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember	14,500,000	
	01.27 Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember	602,358,000	
2.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		317,260,000 Perubahan Penggunaan APBD
	02.23 Kendaraan Dinas Jabatan	51,400,000	
	02.24 Kendaraan Dinas/ Operasional	265,860,000	
3	09. Program Peningkatan Pemahaman Peraturan Perundang-undangan dan Penanganan Pelanggaran Perda		244,700,000 Perubahan Penggunaan APBD
	09.02 Lokasi Potensi Pelanggaran Perda	139,600,000	
	09.03 Pelanggar Peraturan Daerah	105,100,000	
4	11. Program Peningkatan Disiplin dan Penguatan Wawasan Kebangsaan		370,861,500 Perubahan Penggunaan APBD
	11.01 Masyarakat dan ASN	370,861,500	

No	Program	Anggaran	Keterangan
5	16. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal		488,375,000 Perubahan Penggunaan APBD
	16.07 Masyarakat	488,375,000	
6	19. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan		6,528,153,700 Perubahan Penggunaan APBD
	19.01 Aparatur Linmas	6,528,153,700	
7	28. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran		682,128,000 Perubahan Penggunaan APBD

28.01	Sarana dan Prasarana PMK	15,000,000
28.02	Kendaraan Dinas Operasional Pemadam Kebakaran	251,400,000
28.03	Aparatur Pemadam Kebakaran	415,728,000

BUPATI JEMBER

dr. Hj. FAIDA, MMR.

Jember, September 2020
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Jember

Drs. SUPRAPTO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP 196107 21198603 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya penegakan peraturan daerah	1. Persentase pelanggaran peraturan daerah 2. Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani	80% 100%
2.	Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	1. Rasio jumlah Pos kaming per 100 KK 2. Rasio jumlah satlinmas per RT	1:100 1:1
3.	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase penanganan kebakaran sesuai rata-rata waktu respon (<i>Respon Time Rate</i>)	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1,858,938,000 APBD-P
	01.18 Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember	55,000,000	
	01.19 Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember	1,187,080,000	
	01.20 Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember	14,500,000	
	01.27 Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember	602,358,000	
2.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		317,260,000 APBD-P
	02.23 Kendaraan Dinas Jabatan	51,400,000	
	02.24 Kendaraan Dinas/ Operasional	265,860,000	
3.	9. Program Peningkatan Pemahaman Peraturan Perundang-undangan dan Penanganan Pelanggaran Perda		244,700,000 APBD-P
	09.02 Lokasi Potensi Pelanggaran Perda	139,600,000	
	09.03 Pelanggar Peraturan Daerah	105,100,000	
5.	11. Program Peningkatan Disiplin dan Penguatan Wawasan Kebangsaan		370,861,500 APBD-P
	11.01 Masyarakat dan ASN	370,861,500	

No	Program	Anggaran	Keterangan
8.	15. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		- APBD-P
	15.01 Aparatur Linmas	-	
9.	16. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal		488,375,000 APBD-P
	16.07 Masyarakat	488,375,000	
10.	19. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan		6,528,153,700 APBD-P
	19.01 Aparatur Linmas	6,528,153,700	
11.	20. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)		- APBD-P
	20.01 Masyarakat	-	
	20.02 Masyarakat	-	
13.	28. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran		682,128,000 APBD-P
	28.01 Sarana dan Prasarana PMK	15,000,000	
	28.02 Kendaraan Dinas Operasional Pemadam Kebakaran	251,400,000	
	28.03 Aparatur Pemadam Kebakaran	415,728,000	

BUPATI JEMBER

dr. Hj. FAIDA, MMR.

Jember, 2020
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Jember

Drs. FARUQ, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630612 199602 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JEMBER**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya penegakan peraturan daerah	1. Persentase pelanggaran peraturan daerah 2. Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani	80% 100%
2.	Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	1. Rasio jumlah Pos kamling per 100 KK 2. Rasio jumlah satlinmas per RT	1:100 1:1
3.	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase penanganan kebakaran sesuai rata-rata waktu respon (Respon Time Rate)	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.858.938.000 Perubahan Penggunaan APBD
	01.18 Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember	55.000.000	
	01.19 Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember	1.187.080.000	
	01.20 Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember	14.500.000	
	01.27 Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember	602.358.000	
2.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		317.260.000 Perubahan Penggunaan APBD
	02.23 Kendaraan Dinas Jabatan	51.400.000	
	02.24 Kendaraan Dinas/ Operasional	265.860.000	
3	09. Program Peningkatan Pemahaman Peraturan Perundang-undangan dan Penanganan Pelanggaran Perda		244.700.000 Perubahan Penggunaan APBD
	09.02 Lokasi Potensi Pelanggaran Perda	139.600.000	
	09.03 Pelanggar Peraturan Daerah	105.100.000	
4	11. Program Peningkatan Disiplin dan Penguatan Wawasan Kebangsaan		370.861.500 Perubahan Penggunaan APBD
	11.01 Masyarakat dan ASN	370.861.500	

No	Program	Anggaran	Keterangan
5	16. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal		488.375.000 Perubahan Penggunaan APBD
	16.07 Masyarakat	488.375.000	
6	19. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan		6.528.153.700 Perubahan Penggunaan APBD
	19.01 Aparatur Linmas	6.528.153.700	
7	28. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran		682.128.000 Perubahan Penggunaan APBD

28.01 Sarana dan Prasarana PMK
28.02 Kendaraan Dinas Operasional Pemadam Kebakaran
28.03 Aparatur Pemadam Kebakaran

15.000.000
251.400.000
415.728.000



Jember, September 2020
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Jember





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JALAN SUDARMAN 1 ☎(0331) 489164 JEMBER

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2020**

RPJMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>), dan Bersih (<i>Clean Government</i>), serta Profesionalitas Pelayanan Publik	Nilai SKM Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik	Nilai SKM

RENSTRA

Misi	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran OPD	Indikator Sasaran
	Mengelola situasi kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman	Persentase penegakan pelanggaran Peraturan Daerah	1. Meningkatnya penegakan peraturan daerah	1. Persentase pelanggaran peraturan daerah 2. Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani
			2. Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	1. Rasio jumlah Pos kamling per 100 KK 2. Rasio jumlah satlinmas per RT
			3. Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	1. Persentase penanganan kebakaran sesuai rata-rata waktu respon (<i>Respon Time Rate</i>)

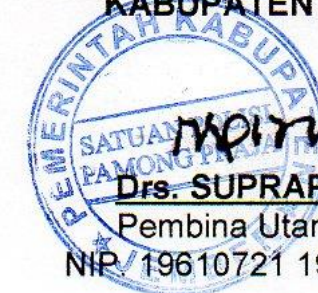
**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2020**

TUJUAN OPD		SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN							
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan (Output)	Target	Anggaran (Rp)				
Mengelola situasi kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman	Persentase Penegakan Pelanggaran Peraturan Daerah	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah	1. Presentase pelanggaran peraturan daerah	80 %	1. Program peningkatan pemahaman peraturan perundang-undangan dan penanganan pelanggaran Perda	Persentase masyarakat yang memahami peraturan perundang-undangan	100%	1. Pengawasan dan inventarisasi pelanggaran peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah	Jumlah lokasi potensi pelanggaran Perda yang terpantau dan terinventarisasi	6 kasus/potensi pelanggaran perda	139.600.000,-				
			2. Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani	100 %								2. Penanganan pelanggaran perundang-undangan dan Peraturan Daerah (PERDA)	Jumlah penanganan pelanggaran Perda	30 kasus pelanggaran perda	105.100.000,-

TUJUAN OPD		SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan (Output)	Target	Anggaran (Rp)
					1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase pengamanan pejabat dan asset Pemkab	100%	1. Pengamanan pejabat dan asset Pemkab	Terjaganya pejabat dan aset Pemkab Jember dan masyarakat dari berbagai gangguan	960 OB	488.375.000
		Meningkatkan peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	1. Rasio Jumlah Pos Kamling Per 100 KK	1:100	1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase tenaga Linmas yang mendapat pelatihan	100%	1. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan	Jumlah tenaga Linmas yang mendapat pelatihan	0 Orang	0
					2. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase satuan Linmas di masyarakat yang terbentuk	100%	1. Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Jumlah Satuan keamanan lingkungan di masyarakat yang terbentuk	1500 Satlinmas	6.528.153.700,-
			2. Rasio Jumlah Satlinmas Per RT	1:1	1. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Linmas yang memahami potensi bencana	100%	1. Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam	Jumlah Linmas peserta pelatihan potensi bencana alam	0 Orang	0

TUJUAN OPD		SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan (Output)	Target	Anggaran (Rp)
		Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase Penanganan kebakaran sesuai rata-rata waktu respon (<i>Response time rate</i>)	100%	1. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase penanganan bencana kebakaran	100%	1. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah pengadaan sarana prasarana pencegahan bahaya kebakaran	3 Paket 2 Stel 5 Unit	15.000.000,-
								2. Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Kendaraan operasional dan sarana yang dapat digunakan secara maksimal	14 Unit	251.400.000,-
								3. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah anggota PMK yang melaksanakan piket siaga	16.107 Orang Hari	415.728.000,-

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN JEMBER**



Drs. SUPRAPTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610721 198603 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Sudarman Nomor 1 Jember

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 065/ 126 /314/2020

TENTANG
**INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

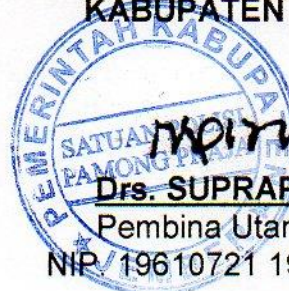
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 6 Januari 2020

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN JEMBER**



Drs. SUPRAPTO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19610721 198603 1 011

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

Instansi : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

Tugas :

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran.
2. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
3. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan : Mengelola situasi kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman

Indikator Tujuan : Persentase penegakan pelanggaran Peraturan Daerah

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> ❖ Perda No. 12 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kab. Dati II Jember. ❖ Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima ❖ Perda No. 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Jember No. 8 Tahun 2003 tentang usaha kepariwisataan ❖ Perda No. 12 Tahun 2006 tentang Izin mendirikan bangunan ❖ Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Rumah Pemdokan ❖ Perda No. 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ❖ Perda No. 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum ❖ Perda No. 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha ❖ Perda No. 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu ❖ Perda No. 09 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung 		

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	Rasio Jumlah Pos Kamling Per 100 KK	$\frac{(\text{Jumlah Pos Kamling} \times 100)}{\text{Jumlah Warga}}$	Bidang Perlindungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Data Poskamling ➤ Data warga
		Rasio Jumlah Satlinmas per RT	$\frac{\text{Jumlah Satlinmas}}{\text{Jumlah RT}}$ <ul style="list-style-type: none"> ➤ SK Wakil Menteri I Urusan Pertahanan Keamanan No. MI/72/1962 ➤ Permendagri No. 84 Tahun 2014 		Data anggota satlinmas
3.	Meningkatnya Penanganan Bahaya Kebakaran	Persentase penanganan kebakaran sesuai rata-rata waktu respon (<i>Respons Time Rate</i>)	$\frac{\text{Jumlah Respons time kejadian kebakaran}}{\text{Jumlah Kejadian Kebakaran}}$ <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000 	Bidang Perlindungan Masyarakat	Data respon penanganan kebakaran